

MODAL SOSIAL MASYARAKAT PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) BUHUNG LALI KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA

*(Social Capital from Community Forest Management Activities At Buhung Lali,
Gantarang Sub-District of Bulukumba)*

ADRAYANTI SABAR^{1✉}, MUHAMMAD DASSIR¹, SRI EKA NUR ITA²

¹Dosen Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10
Makassar, 90245

²Mahasiswa, Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan, Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis
Kemerdekaan Km. 10 Makassar, 90245

✉Penulis Korespondensi: Email adrayantisabar@gmail.com

Diterima: 03 Maret 2022 | Disetujui: 01 Mei 2022

Abstrak. Pembangunan hutan kemasyarakatan memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, untuk meningkatkan pengelolaannya dibutuhkan informasi tentang bagaimana modal sosial bekerja pada aktivitas pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk modal sosial masyarakat pada aktivitas perencanaan dan pelaksanaan HKM Buhung Lali, Kawasan Bangkeng Bukit Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Pendekatan partisipatif, teknik observasi, wawancara, studi literatur dan dokumentasi menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif kuantitatif yang dijabarkan secara deskriptif untuk menjelaskan aktivitas pada tahap perencanaan dan pelaksanaan serta modal sosial (norma sosial, kepercayaan, dan jaringan sosial), untuk mengukur tingkat modal sosial dilakukan dengan persamaan selang nilai. Hasil penelitian menunjukkan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, norma sosial cukup tinggi, masyarakat mematuhi aturan yang berlaku karena adanya sanksi yang mengikat. Tingkat kepercayaan masyarakat secara umum baik, meskipun kepercayaan antar petani dan pihak luar kurang karena partisipasi dalam pengelolaan HKM kurang sehingga masyarakat tani membatasi kepercayaan mereka. Jaringan sosial yang terjalin antar masyarakat cukup baik karena adanya kerjasama yang baik karena masyarakat saling membantu untuk memberhasilkan pembangunan HKM, serta komunikasi dan saling pengertian juga menjadi faktor kuat dalam jaringan sosial. Modal sosial pada HKM Buhung Lali cukup baik dan diharapkan tetap mempertahankan modal sosial yang ada.

Kata kunci: Modal sosial, hutan kemasyarakatan

Abstract. Community forest development requires good planning and implementation, to improve its management information is needed on how social capital works in community forest management activities. This study aims to describe the form of community social capital in the planning and implementation of the Buhung Lali Community Forest (HKM), Bangkeng Bukit Area, Gantarang District, Bulukumba Regency. The participatory approach, observation techniques, interviews, literature studies and documentation are the data collection methods in this study. The data analysis used is qualitative and quantitative which is described descriptively to explain activities at the planning and implementation stages as well as social capital (social norms, trust, and social networks). The

results show that at the planning and implementation stages, social norms are quite high, the community obeys the applicable rules because of the binding sanctions. The level of public trust is generally good, although trust between farmers and outsiders is lacking due to lack of participation in HKm management so that farming communities limit their trust. The social network that exists between communities is quite good because of good cooperation because the community helps each other to produce HKm development, and communication and mutual understanding are also strong factors in social networks. Social capital in HKm Buhung Lali is quite good and is expected to maintain existing social capital.

Keywords: *Social capital, management of community forest*

PENDAHULUAN

Perhutanan sosial (*social forestry*) merupakan suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di wilayah hutan hak, hutan adat, atau hutan negara dan dikelola oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama untuk mengembangkan keseimbangan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan sosial budaya dalam bentuk kemitraan kehutanan, hutan kemasyarakatan (HKm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan desa (HD), dan hutan adat (HA). Tujuan dari pengembangan perhutanan sosial ini untuk mengembangkan partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan sehingga kelestarian hutan tetap terjaga dan diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sekitar hutan. Salah satu program perhutanan sosial seperti HKm ini merupakan bentuk usaha dalam melestarikan hutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan melalui pemanfaatan aset hutan yang adil, optimal, dan berkelanjutan, serta tetap mempertahankan kelestarian hutan (Firdaus, 2018).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa modal sosial yang kuat dapat meningkatkan kondisi hutan lebih baik, berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa modal sosial merupakan prasyarat bagi keberhasilan suatu pembangunan. Modal sosial yang terdiri dari norma sosial,

kepercayaan, dan jaringan sosial telah membantu masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan dan modal sosial telah menjadi energi positif sebagai komponen penting dalam mengelola sumber daya hutan sehingga dapat menjaga kerjasama masyarakat dan kelestarian hutan.

Pembangunan hutan kemasyarakatan memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang baik dalam pengelolaannya, untuk meningkatkan pengelolaan tersebut diperlukan informasi mengenai bagaimana modal sosial bekerja dalam aktivitas pengelolaan hutan kemasyarakatan. Buhung Lali dipilih sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji informasi modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai November tahun 2021, di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Populasi penelitian ini adalah kelompok tani di Buhung Lali, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm). Pengambilan sampel responden dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 40 orang.

Pendekatan partisipatif dengan teknik observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi

merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif untuk menjelaskan aktivitas pengelolaan Hkm Buhung Lali dan unsur-unsur modal sosial (norma sosial, kepercayaan, dan jaringan sosial), serta penilaian tingkatan unsur-unsur modal sosial dalam pengelolaan HKM dilakukan dengan persamaan selang nilai:

$$\text{selang nilai} = \frac{\text{selisih total skor tertinggi dan total skor terendah}}{\text{jumlah kelas}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Norma Sosial pada Tahap Perencanaan

Dalam perencanaan pengelolaan hutan ditetapkan aturan-aturan yang disepakati oleh pengelola HKM, dan peraturan tersebut juga dihadiri dan disusun serta disepakati bersama oleh pihak pemerintah, ketua dan anggota kelompok tani hutan. Penentuan peraturan ini juga termasuk dalam bagian perencanaan pengelolaan hutan untuk menyusun aturan-aturan apa saja yang akan diberlakukan serta kepada pihak yang melanggar aturan akan diberikan sanksi seperti apa. Masyarakat sepakat dengan menghadiri kegiatan perencanaan hutan dan akan mematuhi peraturan yang ada, hal ini membuktikan bahwa norma sosial dalam perencanaan pengelolaan hutan cukup baik dan dijalani dengan baik oleh anggota kelompok tani. Adapun aturan-aturan yang ditetapkan apabila terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi pertama berupa teguran, dan apabila pelanggaran tersebut terjadi terus-menerus maka hak kelola petani tersebut akan digantikan.

Tabel 1. Tingkat norma sosial petani responden pada tahap perencanaan

No.	Kategori Tigkat Norma Sosial pada Tahap Perencanaan	Selang Nilai	Jumlah	Persentase
1.	Rendah	<11,3	2	5%
2.	Sedang	11,3-11,6	0	0
3.	Tinggi	>11,6	38	95%
Jumlah			40	100%

Tabel 1 menunjukkan petani yang ada di lokasi penelitian termasuk dalam kategori tinggi yaitu 95%, adanya aturan-aturan serta sanksi yang diterapkan pada aktivitas pengelolaan hutan membuat masyarakat yang melakukan pelanggaran jarang terjadi dan masyarakat sadar aturan-aturan tersebut diberlakukan untuk kebaikan semua pihak. Salah satu contoh peraturan yang ditetapkan yaitu adanya sanksi apabila ada anggota yang tidak hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan maka pelanggaran pertama akan diberikan sanksi berupa teguran

secara lisa, pelanggaran kedua diberikan sanksi teguran secara tulisan dan pelanggaran ketiga akan diberikan sanksi penggantian hak kelola HKM. Pada Tabel 1 menunjukkan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 5% dimana dua dari empat puluh responden memilih nilai sedang pada pertanyaan kedua yaitu tentang bagaimana ketaatan kelompok tani terhadap aturan pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran yang sebelumnya pernah terjadi membuktikan bahwa masih ada masyarakat yang melanggar aturan yang ada.

Norma Sosial dalam Tahap Pelaksanaan

Pada proses persiapan lahan, aturan penentuan batas areal kerja kelompok disepakati bersama, hal tersebut dilakukan untuk mencegah konflik yang dapat ditimbulkan antar anggota kelompok. Aturan pembagian lahan ini juga untuk memperjelas batas-batas areal kerja antar anggota kelompok. Aturan dalam aktivitas penanaman bibit dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa bibit dan pupuk, pembagian diharapkan dapat terbagi secara adil dan merata untuk meningkatkan pengelolaan hutan. Aktivitas pemeliharaan ini dilakukan

masyarakat dengan menetapkan aturan berupa larangan menebang pohon sembarangan, apabila pelanggaran tersebut dilakukan maka akan diberikan sanksi yaitu menebang satu menanam sepuluh. Aturan yang ditetapkan dalam aktivitas pemanenan hutan yaitu larangan merusak hutan pada saat proses pemanenan berlangsung, dan penebangan pohon sembarangan. Apabila ada pohon yang tumbang akan dikoordinasikan terlebih dahulu kepada polisi hutan untuk mengatasi masalah tersebut, demi mencapai tujuan bersama yaitu tetap menjaga kelestarian hutannya.

Tabel 2. Tingkat norma sosial petani responden pada tahap pelaksanaan

No.	Kategori Tigkat Norma Sosial pada Tahap Pelaksanaan	Selang Nilai	Jumlah	Persentase
1.	Rendah	<11,3	2	5%
2.	Sedang	11,3-11,6	0	0
3.	Tinggi	>11,6	38	95%
Jumlah			40	100%

Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 2 menunjukkan bahwa petani yang ada di lokasi penelitian termasuk dalam kategori tinggi yaitu 95%. Berdasar jumlah perhitungan 38 responden termasuk dalam kategori tinggi dimana masyarakat cukup mematuhi aturan yang ada terbukti pada pelanggaran yang terjadi juga jarang, dapat dilihat hanya dua orang yang memilih tingkat norma sosial yang termasuk dalam kategori sedang (Tabel 2). Pelanggaran pada tahap pelaksanaan sebelumnya pernah terjadi, salah satu contoh pelanggaran yang terjadi yaitu adanya hewan ternak yang merusak lahan petani lain dan pelanggaran tersebut diberi sanksi berupa uang ganti rugi sebanyak Rp. 500.000. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Buhung Lali menjunjung tinggi norma sosial yang ada.

Kepercayaan dalam Tahap Perencanaan

Kepercayaan antar kelompok tani dalam perencanaan dapat dilihat pada partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan

pertemuan yang diadakan, dengan adanya kerjasama antar petani saling mengajak untuk menghadiri tiap pertemuan menunjukkan bahwa rasa percaya kelompok cukup baik. Kepercayaan menjadi salah satu unsur penting dalam modal sosial oleh karena itu rasa saling percaya yang terpelihara dalam kelompok dapat mamajukan kelompok itu sendiri (Mahendra, 2015). Tabel 3 menunjukkan bahwa petani yang ada di lokasi penelitian termasuk dalam kategori sedang yaitu 42,50%, nilai ini menunjukkan bahwa masih adanya sikap kepercayaan antar masyarakat di lokasi penelitian. Kategori rendah yaitu 22,50% hal ini dikarenakan masyarakat Buhung Lali membatasi rasa kepercayaan mereka dengan mempercayai orang-orang terdekat mereka, pihak luar atau lembaga sosial kemasyarakatan (LSM) kurang meykinkan masyarakat karena pihak LSM kurang berpartisipasi dalam setiap pengelolaan hutan sehingga masyarakat kurang mempercayai pihak luar, dan tingkat kepercayaan yang termasuk dalam kategori tinggi yaitu 35%

dimana beberapa masyarakat saling percaya satu sama lain. Salah satu contoh kepercayaan yang terlihat di lokasi penelitian yaitu adanya

antusias masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

Tabel 3. Tingkat kepercayaan petani responden pada tahap perencanaan

No.	Kategori Tingkat Kepercayaan pada Tahap Perencanaan	Selang Nilai	Jumlah	Persentase
1.	Rendah	<10,6	9	22,50%
2.	Sedang	10,6-11,2667	17	42,50%
3.	Tinggi	>11,933	14	35%
Jumlah			40	100%

Antusias dan semangat masyarakat ini tercermin dari kehadiran masyarakat yang selalu memenuhi undangan pertemuan, hal ini dibuktikan dengan adanya sikap kepercayaan masyarakat sebanyak 35%. Sedangkan untuk tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak luar tergolong sedang, untuk itu sikap tanggung jawab seseorang sangat dipentingkan agar anggota kelompok dapat percaya dan kerjasama kelompok akan lebih baik lagi.

Kepercayaan dalam Tahap Pelaksanaan

Beberapa kerjasama dalam bentuk bantuan fisik berupa pembersihan lahan, perbaikan batas areal kerja anggota, dan pembuatan cempungan serta pemberian air untuk tanaman dilakukan

secara gotong-royong. Kerjasama ini meunjukkan adanya kepercayaan yang mendasari hubungan suatu kelompok. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurami (2012) bahwa nilai-nilai kepercayaa dalam suatu kelompok tani rasa percaya adalah alat untuk membangun hubungan dengan orang lain, dan akan menimbulkan bentuk kerjasama dan solidaritas yang tinggi. Tabel 4 menunjukkan bahwa petani yang ada di lokasi penelitian termasuk dalam kategori sedang yaitu 40%. Persentase untuk kategori rendah yaitu 22,50%, dikarenakan petani kurang meyakini pihak-pihak luar yang ikut dalam pengelolaan HKm karena kurangnya partisipasi dalam aktivitas pengelolaan hutan.

Tabel 4. Tingkat kepercayaan petani responden pada tahap pelaksanaan

No.	Kategori Tingkat Kepercayaan pada Tahap Pelaksanaan	Selang Nilai	Jumlah	Persentase
1.	Rendah	<10,6	9	22,50%
2.	Sedang	10,6-11,2667	16	40%
3.	Tinggi	>11,933	15	37,50%
Jumlah			40	100%

Hal tersebut dapat dilihat pada lampiran kuisisioner wawancara, untuk tingkat kepercayaan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan masyarakat cenderung memilih kurang percaya pada poin tingkat kepercayaan petani terhadap pihak luar atau LSM karena kurangnya interaksi dan partisipasi dari pihak

luar tersebut sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat tani. Selebihnya 37,50% petani termasuk dalam kategori tinggi, masyarakat mempercayai orang-orang disekitar mereka dan adanya bentuk kekeluargaan antara masyarakat membuat tingkat kepercayaan mereka tinggi terhadap petani lain.

Jaringan Sosial dalam Tahap Perencanaan

Jaringan sosial merupakan koneksi yang dibuat karena adanya interaksi dalam aktivitas masyarakat (Saam, 2009). Jaringan yang ada dalam kelompok tersebut diwujudkan sebagai kebersamaan antar individu dan kerukunan dengan bertemu dan saling mengenal satu sama lain. Beberapa kegiatan sosial yang dilakukan antara lain dengan bergotong royong

membersihkan tempat pertemuan. KTH Buhung Lali cukup aktif melaksanakan pertemuan rutin kelompok yang dilaksanakan 1-3 kali dalam sebulan, pertemuan rutin tersebut karena adanya dorongan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta ketua KTH yang melakukan pembinaan untuk meningkatkan peran petani dalam pengelolaan lahan.

Tabel 5. Tingkat jaringan sosial petani responden pada tahap perencanaan

No.	Kategori Tingkat Jaringan Sosial pada Tahap Perencanaan	Selang Nilai	Jumlah	Persentase
1.	Rendah	<10,6	2	2%
2.	Sedang	10,6-11,2667	10	25%
3.	Tinggi	>11,933	28	70%
Jumlah			40	100%

Tabel 5 menunjukkan bahwa petani yang ada di lokasi penelitian termasuk dalam kategori tinggi yaitu 70%. Kerjasama kelompok cukup baik dalam tahap perencanaan masyarakat rajin ikut serta dalam setiap pertemuan hal ini juga dilandasi karena adanya rasa saling percaya dan adanya norma yang mengikat. Tingkat jaringan sosial 2% pada kategori rendah dan 25% pada kategori sedang, hal ini dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang kurang aktif dalam bekerjasama contohnya dalam kegiatan pembersihan tempat pertemuan, beberapa masyarakat datang pada saat kegiatan akan dimulai dan hanya beberapa orang yang membersihkan tempat pertemuan. Pada dasarnya kepercayaan dan jaringan tidak dapat dipisahkan, dengan adanya rasa saling percaya, toleransi dan kerjasama dapat membangun jaringan yang baik dalam kelompok.

Jaringan Sosial dalam Tahap Pelaksanaan

Jaringan sosial dalam aktivitas persiapan lahan seperti kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan jalan, perbaikan pengairan, dan pembersihan lahan yang diliputi oleh partisipasi masyarakat. Kelompok tani Buhung Lali cukup aktif dalam kegiatan persiapan lahan, anggota kelompok saling membantu dan bekerja

sama, hal ini membuktikan bahwa jaringan sosial yang terjalin antar kelompok cukup baik.

Pada aktivitas penanaman jaringan sosial antar petani dan pemerintah dapat dilihat dari kerjasama mereka berupa adanya bantuan dari pemerintah dan diharapkan bantuan tersebut dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat. Kerjasama ini akan memberikan hasil yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah.

Jaringan sosial dalam aktivitas pengelolaan hutan dapat dilihat dengan adanya komunikasi yang baik antar petani dan pemerintah, salah satu contohnya dapat dilihat pada kegiatan penyuluhan dimana masyarakat dan pemerintah memfokuskan pada pertukaran informasi mengenai cara yang baik untuk memelihara hutan sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan bersama. Tidak adanya sifat egois dalam diri masing-masing kelompok merupakan bukti bahwa jaringan sosial di desa telah berjalan cukup baik. Pada aktivitas pemanenan jaringan sosial dapat dilihat dari kerjasama antar anggota kelompok dalam proses memanen hasil hutan. Mereka saling membantu untuk meringankan pekerjaan petani serta mengurangi kerusakan hutan akibat proses pemanenan. Menurut Laura (2018), jaringan sosial merupakan bentuk modal

sosial yang tidak terlepas dari kegiatan atau kebiasaan masyarakat.

Tabel 6. Tingkat jaringan sosial petani responden pada tahap pelaksanaan

No.	Kategori Tingkat Jaringan Sosial pada Tahap Pelaksanaan	Selang Nilai	Jumlah	Persentase
1.	Rendah	<11,333	4	10%
2.	Sedang	11,333 -11,666	0	0
3.	Tinggi	>11,666	36	90%
Jumlah			40	100%

Tabel 6 menunjukkan bahwa petani yang ada di lokasi penelitian termasuk dalam kategori tinggi yaitu 90%. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan sosial dan kerjasama masyarakat Buhung Lali cukup baik. Pada aktivitas pengelolaan hutan dapat dilihat berdasarkan informasi sebelumnya bahwa kerjasama petani cukup baik dalam mengola hutan, sikap tolong-menolong dan gotong-royong masyarakat membuktikan kepedulian satu sama lain Anen (2016) mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan membangun modal sosial terletak pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial dan akan menentukan kuat tidaknya modal sosial dalam suatu kelompok. Adapun yang termasuk kategori rendah yaitu 10%, empat dari 40 responden termasuk kategori rendah disebabkan karena kurangnya keikutsertaan mereka dalam gotong-royong dan beberapa masyarakat yang tidak ikut dalam beberapa pertemuan yang diadakan pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Hutan Kemasyarakatan Buhung Lali pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa kehadiran norma sosial sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani. Masyarakat mematuhi aturan yang berlaku, tingginya tingkat

norma sosial dapat memperkuat ikatan modal sosial masyarakat. Selain itu tingkat kepercayaan masyarakat cukup baik karena didukung dengan adanya kerjasama antar masyarakat, kepercayaan kelompok tani dan kelompok tani lainnya, kelompok tani dengan pemerintah, dan kelompok tani dengan masyarakat sekitar hutan cukup baik karena mereka meyakini masyarakat dan pemerintah bekerja bersama untuk memberhasilkan pembangunan HKM di desa mereka. Peran jaringan sosial yang ada di desa Bukit Harapan cukup baik. Selain dilatarbelakangi kepedulian, kekeluargaan, komunikasi, dan saling pengertian juga menjadi faktor yang kuat dalam jaringan sosial di desa yakni kemauan kelompok tani dalam menerima informasi terkait pengelolaan hutan membuktikan adanya jaringan sosial dalam aktivitas lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Anen, N. (2016). Peran modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan rakyat di Kelurahan Selupuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. *Nusa Sylva*, 16(2), 72-81.

Firdaus, A.Y. (2018). *Panduan praktis penerapan kebijakan perhutanan sosial: Kerangka percepatan reformasi tenurial hutan*. Bogor, Indonesia: CIFOR.

Laura. (2018). *Sosial capital (Menuju keunggulan budaya manusia)*. Penerbit MR-United Press, Jakarta.

Mahendra S. (2015). Keterkaitan modal sosial dengan strategi kelangsungan usaha pedagang sektor informal di kawasan Waduk Mulur: Studi kasus pada pedagang sektor informal di kawasan Waduk Mulur Kelurahan Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(2), 10-30.

Nurami, M. (2012). *Peran modal sosial pada pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi*

pada usaha daur ulang di Desa Kedungwonokerto, Kecamatan Prambon, Sidoarjo). Thesis. Universitas Brawijaya, Malang.

Saam, Z. (2013). Implementasi kebijakan program peternakan rakyat sebagai wahana pengembangan modal sosial di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 42-150.